PENGARUH PENYALURAN BLT DANA DESA DAN KEMANDIRIAN DESA DI MASA PANDEMI TERHADAP KEMISKINAN DESA DI INDONESIA

Gema Otheliansyah_1, Riedho Hizwar_2, Gisela Andriani_3, Andhika Putra Ahmad_4, A'rsyil A'zim_5

Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan_1, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan_2, KPPN Palembang_3, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan_4, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan_5

Abstract

Beside its direct impact on public health, the Covid-19 pandemic has also caused impacts on social and economic aspects. To minimize the impacts, government has distributed The Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) have been converted from the Village Fund. BLT Desa is a social safety net program for the economic recovery of communities in form of giving cash to the poor or the underprivileged families in the village that affected by the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the effect of the BLT Dana Desa with the number of independence village as variable that shows the characteristics of provincial villages, to village poverty in 33 Provinces in Indonesia. This study is a quantitative research using panel data regretion. The results showed that the distribution of BLT Dana Desa and increasing the number of independence village had negative impact on village poverty in 33 Provinces in Indonesia.

Abstrak

Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial dan ekonomi selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak tersebut pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang bersumber dari Dana Desa. BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial dalam bentuk pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penyaluran BLT Dana Desa dengan jumlah desa mandiri sebagai variabel yang menunjukkan karateristik dari desa provinsi terhadap kemiskinan desa pada 33 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa dan peningkatan jumlah desa mandiri memiliki pengaruh negatif bagi kemiskinan pedesaan pada 33 Provinsi di Indonesia.

Keywords: The Village Fund Direct Cash Assistance, Village Poverty, *Independent Village*. **JEL Classification:** H770, D6

PENDAHULUAN

Munculnya kasus Covid-19 di Indonesia pada awal maret 2020, menandakan awal mula kondisi kedaruratan kesehatan dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dalam jangka waktu selama 2020 dan 2021, dampak pada aspek kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban Covid-19 di Indonesia yang mencapai 150.831 jiwa. Sedangkan pada aspek Pada ekonomi, pandemi menyebabkan terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat, yang berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga masyarakat di daerah, khususnya pedesaan yang termasuk dalam kategori masyarakat terdampak.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Salah vakni satunya pengutamaan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa yang belum terlindungi dalam jaminan sosial yang ada. Dengan pengaturan tersebut, adanya diharapkan masyarakat miskin desa tidak terlalu terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19.

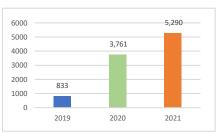
Gambar I.1. Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan 2019 s.d 2021



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan data statistik BPS (Badan Pusat Statistik), Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di Indonesia Tahun 2020 meningkat 583.070 jiwa dari Tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh kontraksi perekonomian masyarakat yang masih berlangsung akibat kondisi pandemi Covid-19 di daerah pedesaan. Namun pada tahun 2021, Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di Indonesia turun 866.890 jiwa dari Tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satu program yang dilaksanakan adalah penyaluran BLT Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa. Dengan adanya pengaturan penggunaan Dana Desa untuk BLT Dana Desa secara khusus diperuntukkan untuk menimalkan dampak pandemi Covid-19.

Gambar I.2. Jumlah Desa Mandiri 2019 s.d 2021



(Sumber: Kemendes PDTT, 2021)

demikian. Namun disamping kondisi pandemi dan menghadapi perubahan pengaturan penggunaan Dana Desa, jumlah desa mandiri di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 (sebelum covid) hingga tahun 2021 yang dapat dilihat pada Grafik I.2. Sebanyak 4.457 telah berubah statusnya menjadi Desa Mandiri di tahun 2021 sejak tahun 2019. Peningkatan status desa. desa-desa menandakan bahwa di Indonesia terus membangun walaupun

tengah dilanda pandemi covid-19. Hal ini juga sejalan dengan salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terwujudnya yakni desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5.000 desa. Kedepannya diharapkan sasaran pembangunan desa dan kawasan desa dapat mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri.

Saat ini program BLT Dana Desa telah berjalan selama 2 tahun dari awal pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program BLT Dana Desa sebagai instrumen untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap penduduk miskin di pedesaan, dengan mempertimbangkan jumlah Desa Mandiri sebagai variabel yang menunjukkan karakteristik desa dari masing-masing provinsi.

TINJAUAN LITERATUR

Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang diberikan kepada tunai, yang masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati et.al.,2020). Sedangkan BLT Dana Desa, yang baru disalurkan mulai tahun 2020, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa, (Kemendes PDTT, 2020).

BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat desa yang belum terlindungi Program Keluarga Harapan ataupun bantuan sosial lainnya. Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. Selanjutnya diberikan Rp300.000 setiap bulan untuk bulan berikutnya. Pada tahun 2020, jumlah Dana Desa yang dialihkan menjadi BLT Dana Desa, sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. BLT Dana Desa pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat dan berlaku sejak Januari 2021 BLT Dana Desa ini bebas pajak sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program BLT Dana Desa ini bersifat sementara sehingga program ini hanya diadakan pada keadaan tertentu, seperti saat ini untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19. Program BLT Dana Desa dilatarbelakangi upaya mempertahankan konsumsi tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak perekonomian pada masyarakat miskin desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan kembali 25% – 35% Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT Dana Desa. Alokasi pemberian BLT Dana Desa tersebut dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa yang diterima, yakni:

- Maksimal 25% dari Dana Desa untuk Desa dengan Pagu Dana Desa kurang dari Rp800 juta
- Maksimal 30% dari Dana Desa untuk Desa dengan Pagu Dana Desa antara Rp800 juta sampai Rp1,2 M
- Maksimal 35% dari Dana Desa untuk Desa dengan Pagu Dana Desa lebih dari Rp1,2 M
- d. Pemda dapat menambah alokasi jika keluarga miskin banyak

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa adalah Keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang terdampak pandemi COVID-19 yang diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil, dengan empat kriteria sebagai berikut:

- a. Kehilangan mata pencaharian,
- b. Belum terdata,
- c. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit kronis, dan
- d. Keluarga miskin yang terhenti menerima JPS

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar hidup kebutuhan dasar sehari-hari (baik berupa pangan, sandang, maupun papan). Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan. iumlah Rendahnya kemampuan pendapatan juga berdampak pada kurangnya kebutuhan kemampuan memenuhi hidup lain seperti kesehatan pendidikan, baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya (Nugroho 1995). mengukur kemiskinan, Untuk **BPS** menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Sumber data utama untuk mengukur kemiskinan adalah data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dibagi menjadi dua periode survei yakni Maret September setiap tahunnya. Untuk tingkat kemiskinan per provinsi dibagi menjadi dua yakni pada kemiskinan perkotaan dan tingkat kemiskinan pedesaan.

Desa Mandiri

Pembangunan desa atau desa membangun merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejauh mana desa telah berkembang dapat dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) akan menentukan 5 status desa yang disebut dengan klasifikasi desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Klasifikasi yang dimaksud adalah desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Desa Mandiri ialah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang sulit, pelayanan umum yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Suatu desa dianggap mandiri jika memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar 0,8155. IDM didapat dari penilaian hasil survey terhadap data Indeks Desa Membangun tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dilakukan setiap tahunnya oleh Kemendes PDTT.

Keistimewaan Desa Mandiri dibandingkan desa dengan empat status lain (regular) ialah, tahapan penyaluran Dana Desa yang hanya melalui dua tahapan yang jauh lebih mudah prosesnya dibandingkan desa regular.

Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Studi tentang kebijakan Bantuan Langsung Tunai dan BLT Dana Desa di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan berbagai penekanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam Jurnal Maun (2020) menunjukkan bahwa efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Selanjutnya, penelitian dalam Dewi dan Adrianus (2021)yang menganalisis pengaruh Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Di Indonesia Terhadap Periode 2005-2015. menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai berdampak pada kemiskinan Indonesia. Di sisi lain, program ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat daripada bantuan berupa sembako. masyarakat dapat mengeluarkan dana untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.

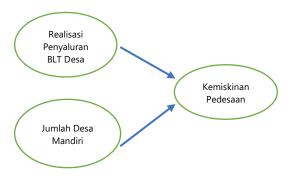
Menurut hasil penelitian Arina, dkk. (2021) menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap adanya peningkatan dana desa maka akan meningkatkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Lalu hal tersebut juga sejalan dengan Penelitian Harianti 2019 yang berjudul Analisis Dana Desa dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Status Desa Di Kabupaten Lombok menemukan bahwa Tengah yang Peranan dana desa mempengaruhi peningkatan Indeks Desa Membangun yang berdampak pada perubahan status desa

Dalam skripsi Fasya (2020),terdapat hubungan yang sedang/cukup kuat antara tingkat kemiskinan dan indeks desa membangun di Kecamatan Korelasi negatif Jabung. berarti hubungan antara dua variabel berbanding terbalik. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka tingkat indeks desa membangun akan semakin maju.

Kerangka Penilitian

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian, secara skematis kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1 Kerangka Penelitian



(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Hipotesis

Dalam Jurnal Maun (2020) menunjukkan bahwa efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan pemerintah oleh pusat tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian Dewi dan Adrianus (2021) yang menganalisis pengaruh Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015, menunjukan bahwa program bantuan tunai langsung berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, program ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat daripada bantuan sosial berupa sembako, karena masyarakat mengeluarkan dana untuk dapat kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.

Dalam skripsi Fasya (2020),terdapat hubungan yang sedang/cukup kuat antara tingkat kemiskinan dan indeks desa membangun di Kecamatan Korelasi negatif Jabung. berarti hubungan antara dua variabel berbanding terbalik. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka tingkat indeks desa membangun akan semakin maju.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Penyaluran BLT Dana Desa dan peningkatan jumlah desa mandiri bepengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data dan Analisis

Pendekatan analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data merupakan data sekunder dalam periode 2020 s.d. 2021, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk data jumlah penduduk miskin desa per provinsi, Kementerian Keuangan untuk data panyaluran BLT Dana Desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk data jumlah desa dengan kategori mandiri.

Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian adalah untuk melihat bagaimana pengaruh BLT Dana Desa dan kemandirian desa terhadap kemiskinan desa di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Adapun model tersebut adalah:

Ln JPMD_{it} =
$$\alpha_{it}$$
 + β_{it} LnBLTDD_{it} + β_{it} JDM_{it} ϵ_{it}

LnJPMD: jumlah penduduk miskin desa LnBLTDD: BLT Dana Desa JDM: jumlah desa mandiri i: cross section data per provinsi t: periode waktu

Penentuan Model

Pada analisis data panel, terdapat 3 (tiga) model estimasi yang umum digunakan (Widarjono, 2007), yaitu

Common Effect Model data panel yang mengabaikan dimensi waktu maupun individu, dengan asumsi bahwa perilaku individu sama disetiap periode waktu.

2. Fixed Effect

Model data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersep. Sementara slope antar individu tetap sama. Model ini disebut juga dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV), sehingga model ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antara individu.

3. Random Effect

Model data panel yang digunakan untuk mengestimasi data dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini, perbedaan intersep (stokastik) diakomodasi oleh *error terms* dari masing-masing individu.

Dalam menentukan model yang tepat untuk digunakan dalam mengestimasi parameter model, menurut Widarjono (2017), terdapat 3 (tiga) uji statisik yang harus dilakukan, yaitu

1. Uji Statisik F (Uji Chow)

Uji Chow bertujuan untuk melihat apakah model Fixed Effect lebih baik daripada model Common Effect. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Cross-Section yangmana jika nilainya di atas nilai toleransi kesalahannya (alpha), maka model yang dipiih adalah Common Effect. model Jika sebaliknya, nilainya dibawah alpha maka model fixed effect yang dipilih.

2. Uji Hausman

Hausmen Uji bertujuan untuk membandingkan antara model Fixed Effect dan Random Effect dan memilih model mana yang lebih tepat diantara keduanya. Penentuan model terbaik dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Cross-section Random dari hasil estimasi. Jika nilainya diatas nilai alpha maka model Random Effect lebih baik, dan sebaliknya.

3. Uji Langrange Multiplier
Uji Langrange Multiplier dilakukan
untuk mengetahui mana yang lebih
tepat antara model Random Effect
dengan model Common Effect.
Penentuan model dilakukan dengan
melihat nilai probabilitas dari
Breush-Pagan yang jika nilainya
diatas nilai alpha maka model
Common Effect yang dipilih, dan
sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi data panel yang dipilih dapat dikatakan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE) jika memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik. Meskipun demikian, tidak semua uji asumsi klasik perlu untuk dilakukan pada regresi data panel. Hal ini bergantung dengan model estimasi yang digunakan. Untuk model estimasi fixed effect, maka uji asumsi klasik yang dilakukan dalah perlu uii heterkedastisitas dan uji multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas dan teriadi heteroskedastisitas tidak (Ghazali. 2011: 139). Uii heteroskedastisitas pada data penelitian menggunakan uji glejser. Menurut Gujarati (2009) uji glejser meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Uii Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui tingkat korelasi dalam model regresi. Menurut Gujarati multikolineritas merupakan (2009),kondisi dimana terdapat korelasi yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel independent. Salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah tidak ada gejala multikoliniearitas dalam multikolinieritas model. Uji yang digunakan adalah variance inflation factors (VIF) dengan melihat nilai Centered VIF yang tidak melebih nilai 10.

Uji Kelayakan Model

1) Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk melihat signifikansi dari koefisien regresi yang didapatkan dari hasil estimasi. Koefisien yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Nachrowi, 2006).

Terdapat 2 (dua) jenis uji hipotesis, yaitu Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Uji Signifikansi Simultan (Uji Statitik F). Namun karena variabel independen pada penelitian hanya satu, maka hanya uji statistik t yang akan dilakukan.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (Ghazali, 2011: 99).

2) Koefisien Determinasi (R²)

R² mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan atau tidak model digunakan dengan melihat variasi variabel dependen. Nilai R² adalah antara nol dan satu. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat dapat diterangkan tidak oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya.

Dalam penelitian ini digunakan Adjusted R² untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, karena R^2 penggunaan adalah bias terhadap iumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena menggunakan Adjusted R² lebih baik (Ghazali, 2011:97)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan Model

Berdasarkan hasil pengujian terhadap model dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel I, dari hasil uji chow, model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect*. Selanjutnya dilakukan uji Hausman dan didapatkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Random Effect*. Sehingga model

terbaik yang akan digunakan dalam estimasi adalah model *Fixed Effect*

Tabel IV.1. Hasil Estimasi Model

No.	Uji	Prob.	α	Model
1	Uji Chow	0.00	5%	FE
2	Uji Hausman	0.00	5%	FE

(sumber: data diolah)

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	-				
Method: Panel Least S Date: 03/02/22 Time: Sample: 2020 2021 Periods included: 2	Periods included: 2				
	Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 66					
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro					
C LOG(BLTDD) DM	1.468807 -0.039961 0.000157	1.153962 0.043179 0.000300	1.272839 -0.925486 0.522906	0.2078 0.3582 0.6029	
	0.000.0.	0.00000	0.0==000	0.00	

(sumber: data diolah)

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, diketahui bahwa nilai probabilitas dari variabel log BLTDD sebesar 0,35 dan DM sebesar 0,6, diatas nilai tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas heterokedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Tabel 3. Uji Kelayakan Model

raber of the ayantan meas				
No	Uji	Variabel	Prob	Hasil
1.	Uji	LnBLTDD	0.04	signifikan
2.	Statistik t	DM	0,00	signifikan
3.	Adj. R ²	0.999445		

(Sumber: data diolah)

Hasil dari uji kelayakan model adalah sebagai berikut:

- Uji statistik t atas variabel LnBLTDD dan DM, didapat nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, yang artinya kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variable JPMDD;
- Adjusted R² bernilai 0,999445, menjelaskan bahwa kemampuan variabel independen BLTDD dan DM dalam menjelaskan varians dari variabel dependen JPMDD adalah sebesar 99.9%.

Dari dua indikator ini, dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak untuk digunakan.

Analisis Deskriptif

Kemiskinan Desa

Gambar IV.1. Kondisi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di 33 Provinsi di Indonesia

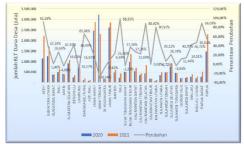


(Sumber: Diolah dari data BPS)

Kemiskinan desa yang mengindikasikan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa. Secara umum, jumlah penduduk miskin pedesaan di 33 provinsi pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar atau 866.839 iiwa turun 5.59% dibandingkan Tahun 2020. Pada 26 provinsi, jumlah penduduk miskin pedesaan mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan desa terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur sebesar 275.150 jiwa. Sedangkan penurunan tertinggi terdapat pada Provinsi Banten, yakni sebesar 13,18%. Sementara itu, terdapat 7 Provinsi mengalami penambahan jumlah penduduk miskin pedesaan selama masa pandemi covid-19. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan penambahan jumlah penduduk miskin pedesaan terbanyak, yakni sebesar 27.760 jiwa.

Jumlah Penyaluran BLT Dana Desa

Gambar IV.2. Kondisi Penyaluran BLT Dana Desa di 33 Provinsi di Indonesia



(Sumber: Diolah dari data BPS)

Penyaluran BLT Dana Desa dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat miskin desa. Secara umum, jumlah penyaluran BLT desa di 33 provinsi pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 4,71 triliun atau 20,67% dibandingkan Tahun 2020. Peningkatan penyaluran BLT DD tertinggi terdapat pada Provinsi Bali sebesar Rp 217 miliar (98,53%). Sedangkan penurunan penyaluran BLT DD terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 416 miliar (-28,14 %). Jika dikonversi menjadi jumlah KPM, maka terdapat 1.787.918 KPM yang belum mendapatkan BLT.

Peningkatan Desa Mandiri

Peningkatan status desa menjadi Desa Mandiri mengindikasikan telah tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa melalui tata kelola pembangunan yang semakin baik. Secara umum, jumlah Desa Mandiri di 33 provinsi pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.529 jiwa atau naik 40,65% dibandingkan Tahun 2020. Pada 26 provinsi, mengalami peningkatan jumlah Desa Mandiri. Peningkatan jumlah Desa Mandiri terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 365 desa. Sementara itu, terdapat 7 Provinsi tidak mengalami penambahan jumlah desa mandiri selama masa pandemi covid-19.

Pengaruh BLT Dana Desa dan Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Terhadap Kemiskinan

Tabel IV.1. Hasil Estimasi Model Data Panel Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std.	t-	Prob.
		Error	Statistic	
С	14.08	0.78	17.96	0,00
LnBLTDD	-0.06	0.03	-2.09	0,04
DM	-0.0003	0.00	-3.22	0.01

Sumber: (data diolah)

Dari hasil estimasi terhadap model data panel *Fixed Effect*, maka didapatkan koefisien dari variabel yang digunakan sebagai berikut:

$$LnJPMD_{it} = 14,08 - 0,06 \ LnBLTDD_{it} - 0,0003 \ DM_{it} + \epsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil estimasi model data panel pada tabel IV.1, didapatkan bahwa Variabel BLT Dana Desa (Ln BLTDD) memiliki pengaruh negatif dan siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan (LnJPMD), dengan nilai koefisien pengaruh sebesar -0.061216. Artinya dalam setiap kenaikan BLT Desa sebesar 1% secara rata-rata, maka jumlah penduduk miskin desa akan turun sebesar 0,06%. Untuk Variabel Jumlah Desa Kategori Mandiri (DM) juga berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaaan (LnJPMD) sebesar -0,0003. Artinya, setiap kenaikan jumlah desa kategori miskin (DM) sebanyak 1 desa secara rata-rata, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin desa sebanyak 0,0003%. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyaluran BLT Dana Desa dan peningkatan jumlah desa mandiri terhadap **Tingkat** Kemiskinan Pedesaan pada 33 Provinsi pada periode 2020 s.d. 2021 (di masa pandemi covid-19). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. diketahui bahwa penyaluran BLT Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Selanjutnya peningkatan jumlah desa mandiri juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaaan.

Hasil ini menyimpulkan bahwa program BLT Dana Desa yang dimulai sejak awal pandemi Covid-19 berjalan efektif karena mampu menjadi program yang turut mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan selain sebagai penyangga bagi penduduk miskin pedesaan tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam.

Saran

Berkenaan dengan hasil pengujian dan kesimpulan diatas, berikut rekomendasi yang diusulkan:

 Program BLT Dana Desa muncul ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dan dari hasil penelitian ini didapat bahwa program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di pedesaan. Sehingga program BLT Dana Desa dapat dipertimbangkan untuk terus

- dilanjutkan meskipun Pandemi Covid-19 telah berakhir.
- Pemerintah desa dan Pemerintah Kab/Kota penerima alokasi Dana Desa perlu untuk memastikan penyaluran dan penggunaan BLT Dana Desa agar tepat sasaran dan memberikan pengaruh yang lebih besar;
- 3. Diharapkan setiap desa memperhatikan dan memiliki target pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terukur sehingga semakin cepat lagi jumlah penambahan desa dengan status mandiri di Indonesia;
- 4. Penelitian tentang pengaruh BLT Dana Desa terhadap Kemiskinan Pedesaan di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan series data, dan variabel lainnya yang dapat tambahan memberikan pengetahuan terkait efektivitas program pemerintah terkait kemiskinan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Implikasi penelitian dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan mulai dari Kementerian Keuangan c.g. DJPK dan DJPb, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Daerah Tertinggal, dalam ranah implementasi kebijakan dan penyaluran BLT Dana Desa dan peningkatan jumlah desa mandiri terutama terkait perananya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan, diantaranya:

- Jangka waktu periode penelitian yang digunakan hanya 2 periode, yakni dimulai dari tahun 2020-2021. Hal ini disebabkan masih terbatasnya data penyaluran BLT Dana Desa yang juga merupakan program baru pemerintah.
- Sampel penelitian sebanyak 198 observasi dengan 33 Provinsi periode 2020 s.d. 2021 berdasarkan purposive sampling yang bersifat subjektif. Hasil berbeda dari penelitian ini dapat terjadi jika menggunakan teknik pengambilan sampel lain.

REFERENSI

Buku, Jurnal dan Sumber Lainnya Nugroho, H. (1995). Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta: Aditya Media.

- Nachrowi, D.N. dan H. Usman (2002).

 Penggunaan Teknik
 Ekonometrika. Jakarta: PT Raja
 Grafindo Persada.
- Widarjono, Agus (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harianti. (2019). Analiisis Dana Desa dan Pengaruhnya Terhadap Status Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi. Universitas Mataram.
- Maun, C.E.F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi

- Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, 9(2)
- Fasya, Muhammad Najih (2020) Hubungan Kemiskinan dan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Sarjana 0074hesis, Universitas Brawijaya.
- Dewi, Ratna, & Andrianus, H.F. (2021).

 Analisis Pengaruh Kebijakan
 Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 Terhadap Kemiskinan Di
 Indonesia Periode 2005-2015.
 Jurnal Menara Ilmu, XV (2).
- Arina, Masinambow & Een N.W. (2021).
 Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi
 Dana Desa Terhadap Indeks Desa
 Membangun Di Kabupaten
 Minahasa Tenggara. Jurnal
 Pembangunan Ekonomi dan
 Keuangan Daerah, Vol.22 No.3.

Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2016).
 Peraturan Menteri Desa,
 Pembangunan Daerah Tertinggal,
 dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
 2016 Tentang Indeks Desa
 Membangun
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020).
 PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang
 Kebijakan Keuangan Negara dan
 Stabilitas Sistem Keuangan untuk
 Penanganan Pandemi Corona
 Virus Disease 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020).

 Peraturan Menteri Desa,
 Pembangunan Daerah Tertinggal,
 dan Transmigrasi No. 6 Tahun
 2020 tentang Perubahan atas
 Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020).
Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024